

Model Komunikasi Politik Identitas Partai Solidaritas Indonesia di Media Sosial Pada Pemilu Legislatif 2019

Tri Suharman

Universitas Mercu Buana Jakarta

trisuharman@gmail.com

Abstract: *The Indonesian Solidarity Party (PSI) is one of the new political parties participating in the 2019 Election. The presence of PSI attracted public attention because of its controversial political messages related to gender equality and religion issues on social media. This study aims to determine the political communication model of PSI's identity on social media in the 2019 Election. From this study, it is concluded that communicators of PSI use political messages related to gender and religion issues due to the lack of attention of other political parties on those topics. The symbolic interactions in this study are illustrated through the similarity of thinking (mind), self-concept (self), and society of the political communicators in looking at gender and religion issues. The tendency of the identity politics of the PSI's communicator is resistance identity. Meanwhile, that party identity political communication model is found in the process of creating PSI political messages through symbolic interactions.*

Keywords: *Indonesian Solidarity Party, Political Communication*

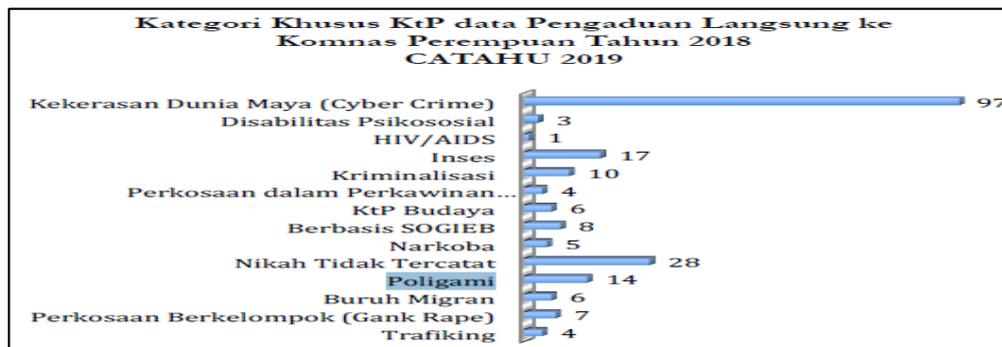
Abstrak: *Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi salah satu partai politik baru yang mengikuti Pemilu Legislatif 2019. Kehadiran PSI menjadi perhatian publik karena pesan politiknya yang kontroversi terkait gender dan agama di media sosial. Penelitian ini bertujuan mengetahui model komunikasi politik identitas PSI di media sosial pada Pileg 2019. Dari penelitian ini, disimpulkan komunikator politik PSI menggunakan pesan politik terkait gender dan agama karena kurangnya perhatian parpol pada isu tersebut. Interaksi simbolik dalam penelitian ini tergambar melalui kesamaan berpikir (mind), konsep diri (self), serta bermasyarakat (society) para komunikator politiknya dalam memandang isu gender maupun agama. Sementara kecenderungan politik identitas komunikator politik PSI adalah resistance identity. Sedangkan model komunikasi politik identitas PSI terdapat pada proses penciptaan pesan politik PSI melalui interaksi simbolik antara komunikator yang melahirkan kecenderungan politik identitas, kemudian menciptakan pesan politik yang berkaitan diskriminasi gender maupun politisasi agama yang disalurkan ke media sosial.*

Kata kunci: *Komunikasi politik, Partai solidaritas Indonesia*

Pendahuluan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan satu dari 20 partai politik yang mengikuti Pemilu Legislatif 2019 (kpu.go.id, 2018). Pileg 2019 ini adalah pesta demokrasi yang kali pertama diikuti oleh PSI sejak diperkenalkan ke publik pada 2015 (Merdeka.com, 2015). Partai baru ini didirikan oleh mantan Ketua PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah Raja Juli Antoni serta dua jurnalis yakni Grace Natalie dan Isyana Bagoes Oka (psi.id, 2018). Grace kemudian menjadi Ketua Umum PSI, Raja Juli sebagai Sekretaris Jenderal PSI, serta Isyana sebagai ketua dewan pengurus pusat PSI (Merdeka.com, 2015). PSI mencitrakan diri sebagai partai anak muda dengan profil usia pengurus pusat hingga ke daerah pada rentang 20 hingga 30 tahun. PSI juga memasang syarat usia maksimal 45 tahun bila hendak bergabung menjadi anggota partai politik tersebut (psi.id, 2018). Kondisi tersebut menjadi permasalahan bagi PSI yang harus berkompetisi dengan partai politik lainnya di Pileg 2019. Persoalan lain yang dihadapi PSI adalah ambang batas parlemen yang mencapai 4% pada 2019. Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan Parpol peserta pemilu yang di bawah 4% dinyatakan tidak akan meraih kursi di DPR RI. Persoalan tersebut terbukti menjadi batu sandungan PSI pada Pileg 2019 karena menjadi salah satu parpol yang tidak lolos ambang batas parlemen dengan total suara 2.650.361 suara sah atau 1,89 persen (kpu.go.id, 2019).

Kendati demikian, kehadiran PSI membawa warna tersendiri pada perpolitikan nasional Pemilu Legislatif 2019. Partai politik baru itu muncul dengan pesan-pesan politik yang kontroversi bahkan tergolong tak populer bagi kalangan partai politik di Tanah Air. Sehingga menjadi sorotan masyarakat maupun kalangan elite politik yang pada akhirnya menambah permasalahan bagi PSI sendiri. Hal itu lantaran pesan politik PSI masuk pada ranah politik identitas yang disebut Agnes Heller berfokus pada perbedaan sebagai satu kategori politik utama (Abdilah S, 2002). PSI mengampanyekan penolakan terhadap diskriminasi gender karena menurut Subhan (2002), diskriminasi gender adalah setiap perbedaan, pengingkaran, atau pembatasan yang senantiasa dilekatkan oleh masyarakat pada umumnya dengan alasan gender, sehingga mengakibatkan penolakan terhadap pengakuan keterlibatan serta adanya pelanggaran pada hak asasi antara perempuan dan laki-laki pada semua aspek kehidupan (Hasanah, 2016). PSI juga menilai poligami sebagai tindakan kekerasan di rumah tangga yang implikasinya psikologis dan kekerasan fisik (Hidayatullah N, Fathurrahman A, Murtadho M, Syakhshiyah A. 2019). Adapun Poligami merupakan sebutan bagi pria yang beristri lebih dari satu, yang menjadi sesuatu yang dilematis dan polemik bagi masyarakat, khususnya perempuan (Al-Banjary 2007). Penolakan PSI terhadap praktik poligami tertuang dalam Peraturan Organisasi Bab I Pasal 5 Poin 2.c. Salah satu isinya adalah Pengurus dan Caleg PSI tidak boleh poligami. Konsekuensi dari aturan tersebut adalah empat kader PSI yang menjadi calon legislatif 2019 dari daerah pemilihan di Jawa Timur dan Sulawesi dipecat.



Gambar 1. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan. (Sumber: Komnas Perempuan, 2019)

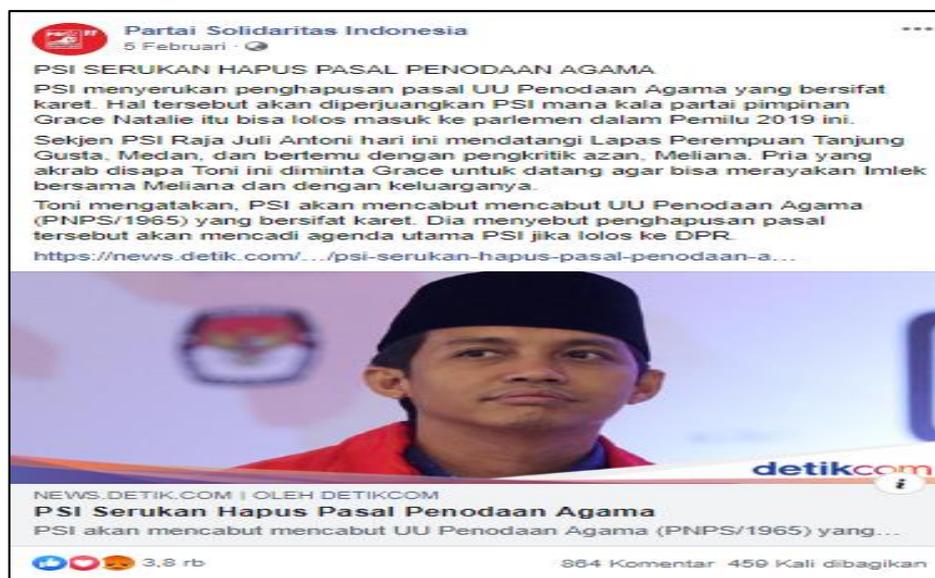
Walaupun demikian, pesan politik PSI tentang penolakan terhadap poligami ditentang berbagai kalangan seperti partai politik. Partai Demokrat misalnya, menilai PSI mencari sensasi semata, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menganggap PSI bersikap tidak demokratis karena melarang sesuatu yang tidak dipersoalkan di Indonesia (BBC Indonesia, 2018). Bahkan sejumlah ormas Islam seperti Koordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi) bersama Persaudaraan Alumni (PA) 212 memprotes PSI dan akhirnya melaporkan Ketua Umum PSI Grace Natalie ke Bareskrim Polri akibat pesan politik tersebut (Republika.com, 2019). Selain persoalan diskriminasi terhadap perempuan, PSI juga menolak politisasi agama. Salah satu bentuk pesan politik PSI adalah menolak peraturan daerah (Perda) berdasarkan agama atau syariah. PSI menilai peraturan yang berbasis agama memicu meningkatnya politik identitas dan intoleransi karena aturan yang berdasarkan satu agama dipaksakan pada semua warga yang jelas-jelas berbeda agama (psi.id, 2018).



Gambar 2 Pesan Politik AntiPerda Syariah PSI di Twitter. (Sumber: Twitter @psi_id)

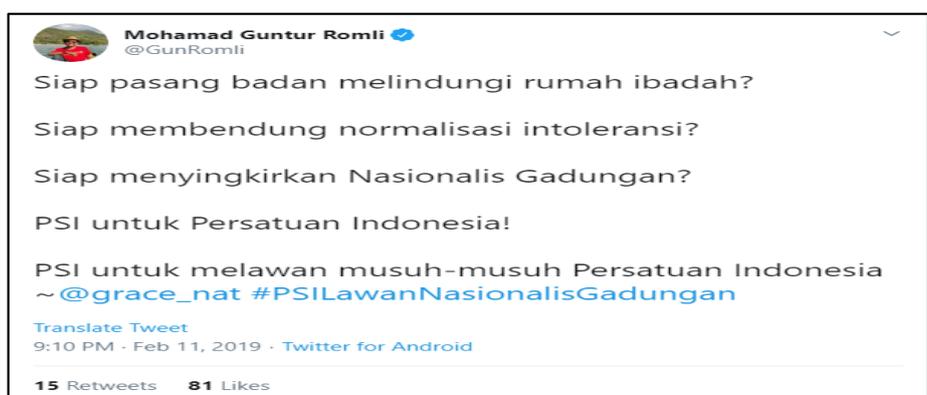
Perda berbasis agama atau Perda syariah sudah meluas di Indonesia sampai saat ini. Buehler dalam *The Politics of Shari'a Law* (2016) menyebutkan perda syariah mulai muncul antara rentang 1998 sampai 2013 dengan jumlah mencapai 443 perda syariah. Adapun jenis-jenis perda bermuatan syariah menyangkut isu moralitas masyarakat secara umum, anti

pelacuran dan perzinahan, kemudian berkaitan dengan fashion, keharusan memakai jilbab dan jenis pakaian lainnya, serta keterampilan beragama (Habibi. 2016). PSI juga getol menyuarakan sikapnya pada kasus-kasus hukum dengan pasal penodaan agama, misalnya kasus mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Menurut PSI vonis hukuman yang diganjkarkan hakim pada Basuki alias Ahok adalah bentuk matinya keadilan serta kemenangan intoleransi dan radikalisme di Indonesia (psi.id, 2017). PSI juga menyoroti pembatasan pembangunan rumah ibadah seperti Peraturan Bersama Menteri mengenai Pendirian Rumah Ibadah. PSI menilai aturan tersebut harus dicabut karena melanggar kebebasan memeluk agama dan beribadah (Tempo.co,2019).



Gambar 1.3 Pesan Politik PSI tentang Penodaan Agama di Facebook

(Sumber: Facebook @psi.or.id)



Gambar 1. 4 Pesan politik Juru Bicara PS Guntur Romli tentang rumah ibadah.

(Sumber: Facebook @GunRomli)

Semua pesan politik PSI baik antipoligami, anti Perda Syariah, menolak kasus penodaan agama, serta menolak aturan pembangunan rumah ibadah, tersebut secara continue disampaikan PSI di media sosial, sebagai saluran (channel) utama kampanyenya dalam Pemilu 2019. PSI menggunakan media sosial dalam menyampaikan pesan politiknya karena hendak meraih suara kalangan milenial dalam Pemilu 2019 (Kumparan.com, 2018). Istilah milenial dicetuskan oleh William Strauss dan Neil pada 1987 yaitu pada saat anak-anak yang lahir pada 1982 masuk pra-sekolah. Sedangkan Elwood Carlson (2008) yang menyatakan generasi milenial lahir dalam rentang waktu 1983-2001. Generasi milenial juga disebut sebagai generasi Y. Istilah ini mulai dikenal dan dipakai pada editorial koran besar.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, fokus penelitian ini adalah Model Komunikasi Politik Identitas Partai Solidaritas Indonesia di Media Sosial pada Pemilu Legislatif 2019, yang dirumuskan dalam subfokus sebagai berikut, *pertama* mengapa komunikator PSI menciptakan pesan politik terkait diskriminasi gender dan politisasi agama? *Kedua* bagaimana interaksi simbolik komunikator politik PSI dalam memproduksi dan mendistribusikan pesan politiknya? *Ketiga* apa kecenderungan politik identitas yang dibangun komunikator PSI dalam pesan politiknya? *Empat* bagaimana model komunikasi politik identitas PSI di media sosial pada Pemilu Legislatif 2019?

Metode

Dalam penelitian ini peneliti memilih metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus karena kajian ini mengkaji sebuah fenomena unik individu, organisasi, sosial dan politik (Yin, 1996). Bentuk dari metode studi kasus yakni analisis deskriptif, yaitu terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas (Sutedi, 2009). Dalam penelitian ini, *informan* yang dipilih adalah Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antony. Sejumlah kriteria menjadi dasar bagi peneliti menjadikan Raja Juli sebagai *key informan* sebagai berikut:

- 1) Raja Juli adalah pendiri PSI
- 2) Raja Juli menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PSI yang berfungsi mengatur struktur dan kebijakan organisasi PSI di bawah koordinasi langsung ketua umum.
- 3) Raja Juli sebagai salah satu tokoh internal PSI yang mencetuskan gagasan terkait pesan politik PSI. Teknik *Snowball Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang secara berantai yakni mencari sumber lain untuk memberikan data dan informasi yang belum lengkap pada sumber sebelumnya. Terdapat tiga informan tambahan dari internal PSI yang diwawancarai dalam penelitian ini yakni Ketua Tim Kampanye Nasional PSI Andy Budiman, Manajer Kampanye Media Sosial PSI Halimah, serta Juru Bicara PSI Muhamad Guntur Romli. Pemilihan tiga informan tersebut juga sekaligus mendukung konsep *society* dalam teori interaksi simbolik yang digunakan dalam penelitian ini. Khususnya unsur *particular others* yaitu orang lain secara khusus yang menurut Mead merujuk pada individu-individu dalam masyarakat yang signifikan seperti kolega di tempat kerja (West & Turner, 2009). Oleh karena itu pemilihan ketiga informan tersebut berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Ketiga informan berada dalam organisasi PSI
 - 2) Ketiga informan memiliki jabatan yang berkaitan dengan kampanye PSI di Pemilu Legislatif 2019.

3) Ketiga informan terlibat langsung dalam perumusan pesan politik PSI

Selain dari internal PSI, peneliti juga memiliki dua informan tambahan lainnya yang merepresentasikan masyarakat umum yakni Syarifah Rosikhoh Hafiyah dan Rahmat bin Ayyub. Keduanya dipilih sebagai informan tambahan untuk mendukung dua konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama konsep *society* dalam teori interaksi simbolik. Dalam konsep tersebut terdapat unsur *generalized other* atau orang lain secara umum (West & Turner, 2009). Sedangkan Iboroma, Ibiene Evelyn (2017) menyatakan *generalized other* menggambarkan perspektif, sikap, dan peran suatu kelompok untuk dimasukkan ke dalam pikiran individu. Konsep lainnya adalah generasi milenial yaitu generasi yang lahir pada rasio tahun 1980 sampai dengan 2000 (Indah B *et.al*: 2018:13). Oleh karena itu pemilihan kedua informan tambahan ini berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Berada dalam rentan usia kalangan milenial (Syarifah kelahiran 1 Januari 1990 dan Rahmat kelahiran 4 Desember 1989)
- 2) Memiliki media sosial Facebook, Twitter, dan Instagram
- 3) Pernah melihat maupun mengomentari pesan politik PSI di media sosial
- 4) Bukan merupakan anggota partai politik tertentu

Hasil dan Pembahasan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah partai politik yang diperkenalkan ke publik pada 2015 (Merdeka.com, 2015). PSI kemudian resmi menjadi partai politik setelah mendapatkan status badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Oktober 2016 (Kompas.com, 2016). Setahun kemudian, PSI lolos menjadi satu dari 20 partai politik yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum untuk mengikuti Pemilu Legislatif 2019 dengan mendapatkan nomor urut 11 (kpu.go.id, 2018). Dengan demikian, Pileg 2019 menjadi pesta demokrasi pertama yang diikuti oleh PSI sebagai partai politik. PSI didirikan oleh sejumlah anak muda, tiga diantaranya mantan Ketua PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah Raja Juli Antoni serta dua mantan presenter televisi yakni Grace Natalie dan Isyana Bagoes Oka (psi.id, 2018). Grace lalu dipilih menjadi Ketua Umum PSI, Raja Juli sebagai Sekretaris Jenderal PSI, serta Isyana sebagai ketua dewan pengurus pusat (Ketua DPP) PSI (Merdeka.com, 2015).

Komunikator Politik PSI

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam kepada *key informan* dan para informan mulai Juli sampai Oktober 2019. Mereka dibagi berdasarkan konsep komunikator utama politik Dan Nimmo yang terdiri dari tiga bagian yakni komunikator politikus, profesional, dan aktivis (Nimmo, 1989:32). Peneliti mengkategorikan Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni dan Ketua Tim Kampanye Nasional PSI Andy Budiman sebagai komunikator politikus dalam penelitian ini. Sedangkan Manajer Kampanye Media Sosial Halimah sebagai komunikator profesional. Adapun komunikator aktivis adalah Juru Bicara PSI Muhamad Guntur Romli.

Untuk kategori politikus, Dan Nimmo mengatakan politikus tidak hanya seseorang yang memegang jabatan dalam pemerintah, politikus juga adalah seorang organisator utama partai politik (Nimmo, 1989). Dobb (dalam Harun dan Sumarno, 2006) mengatakan politikus berada di sebuah partai politik (parpol) untuk kepentingan dan aktualisasinya lebih kongkrit dalam melakukan politik praktis. Sedangkan Daniel Katz menyatakan politikus juga adalah seorang ideolog yang menawarkan gagasan yang lebih baik (dalam Nimmo, 1989).

Dari penjelasan tersebut peneliti menilai Raja Juli Antoni serta Andy Budiman masuk dalam kategori politikus. Sejumlah hal yang meyakinkan peneliti yakni Raja Juli dan Andy Budiman berada di pucuk pimpinan organisasi PSI, tugas mereka merumuskan gagasan menciptakan pesan politik, menentukan kelayakan sebuah pesan politik untuk disampaikan ke publik, serta memonitor seluruh kegiatan kampanye PSI dalam pemilu 2019 termasuk di media sosial.

Interaksi Simbolik dalam Komunikator Politik PSI

Penelitian ini kemudian menggunakan teori interaksi simbolik untuk mengetahui Model Komunikasi Politik Identitas Partai Solidaritas Indonesia di Media Sosial pada Pemilu Legislatif 2019. George Herbert Mead mengatakan terdapat tiga konsep utama dalam interaksi simbolik yaitu pikiran, diri sendiri, dan masyarakat (*mind, self and society*) (Littlejohn, 2012).

Dalam konsep pikiran (*mind*) George Herbert Mead (dalam West & Turner, 2009: 104) mengemukakan bahwa terdapat dua unsur yang cukup terkait yakni pemikiran (*thought*) dan pengambilan peran (*role taking*). Pemikiran (*thought*) dinyatakan sebagai percakapan di dalam diri sendiri. Maka, tidak ada "pikiran atau pikiran tanpa bahasa;" dan bahasa (isi pikiran) "hanyalah pengembangan dan produk dari interaksi sosial" (Mead.1934). Sedangkan *role-taking* adalah kemampuan simbolik seseorang menempatkan diri sendirinya dalam khayalan orang lain.

Sedangkan konsep *self* menurut Mead ialah orang yang mampu menjadi subjek dan objek bagi dirinya sendiri. Terdapat dua elemen atau unsur dalam *self* yakni *I* dan *Me*. Unsur *I* sebagai subjek kita bertindak, dan *Me* berlaku sebagai objek untuk mengamati diri kita sendiri dalam bertindak (West & Turner, 2009).

Konsep ketiga adalah masyarakat (*society*). Menurut Mead terdapat dua unsur masyarakat yaitu orang lain secara khusus (*particular others*) dan kedua adalah orang lain secara umum (*generalized other*). Mead mengatakan orang lain secara khusus (*particular others*) merujuk pada orang-orang dalam kelompok masyarakat seperti anggota keluarga, teman, dan kolega di tempat kerja serta supervisor. Sedangkan orang lain secara umum (*generalized other*) adalah cara pandang dari sebuah kelompok masyarakat (West & Turner, 2009). Tiga konsep ini kemudian digunakan dalam teori interaksi simbolik untuk mengidentifikasi bagaimana model Komunikasi politik identitas Partai Solidaritas Indonesia di media sosial pada Pemilu 2019. Berikut hasil wawancara peneliti dengan masing-masing komunikator politik PSI.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Model Komunikasi Politik Identitas Partai Solidaritas Indonesia di Media Sosial Pada Pemilu Legislatif 2019, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Alasan komunikator politik PSI menggunakan pesan politik terkait diskriminasi gender dan politisasi agama adalah kedua persoalan tersebut merupakan masalah yang besar di Tanah Air tapi tidak menjadi perhatian partai politik. Oleh karena itu pesan politik tersebut sekaligus kritik terhadap parpol yang lebih mengutamakan kepentingan meraih suara dalam Pemilu

Legislatif 2019. Interaksi simbolik dalam penelitian ini tergambar melalui kesamaan berpikir (*mind*) para komunikator yaitu lebih menonjol pada unsur pengambilan peran (*role taking*), kesamaan konsep diri (*self*) yaitu lebih kuat pada unsur *I*, serta kesamaan komunikator dalam hubungannya dengan masyarakat (*society*) yaitu lebih berfokus pada unsur orang lain secara khusus (*particular others*). Sementara kecenderungan politik identitas komunikator politik PSI adalah *resistence identity* karena menyuarakan keberpihakan kepada kaum yang tertindas serta melakukan perlawanan terhadap pihak yang menolak dan mengkritik pesan politik tersebut. Adapun model komunikasi politik identitas PSI tampak pada proses penciptaan pesan politik PSI melalui interaksi simbolik antara komunikator politikus, profesional, dan aktivis secara berkesinambungan yang melahirkan kecenderungan politik identitas yakni *resistence identity*, kemudian menciptakan sejumlah pesan politik seperti antipoligami dan antiperda syariah yang disalurkan komunikator profesional dan aktivis ke media sosial atas persetujuan komunikator politikus. Melalui media sosial tersebut, terjadi interaksi dengan masyarakat umum yang sebagian menganggap pesan politik PSI tidak mencerminkan problem utama anak muda. Kendati kritikan dan penolakan di media sosial menjadi bahan evaluasi komunikator politik PSI, pesan politik PSI tidak berubah.

Referensi

BUKU :

- Abdillah S., Ubed. 2002. Politik Identitas: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Magelang: Yayasan Indonesiatara.
- Ahmad, Nyarwi. 2012. Manajemen komunikasi Politik dan Marketing Politik, Sejarah, Perspektif dan Perkembangan Riset, Yogyakarta: Pustaka Taman, 2012.
- Anas, Sudijono. 1996. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Press.
- Arni Muhammad. 1992. Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Bina Aksara. h 127
- Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____. 2002. Metodologi Penelitian. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Atmoko, Bambang Dwi. 2012. Instagram Handbook. Jakarta: Media Kita.

JURNAL :

- Anshari, F. (2013). Komunikasi Politik di Era Media Sosial. Jurnal Komunikasi. <https://doi.org/10.1021/acs.orglett.5b02435>
- Alver & Caglar. 2015. The Impact Of Symbolic Interactionism On Research Studies About Communication Science. International Journal of Arts & Sciences, CD-ROM. ISSN: 1944-6934 :: 08(07):479–484 (2015). <http://universitypublications.net/>
- Budiyono. 2015. Fenomena Komunikasi Politik dalam Media Sosial. Jurnal IPTEK-KOM, Vol. 17 No. 2, Desember 2015: 143-160 ISSN 1410 – 3346.(Sumber: <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/iptekkom/article/view/436> diakses 5 April 2019.
- Boyd, D. M., & Ellison, N. B. 2007. Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x>
- Cristian, Valeriani, Barberá, Bonneau, Jost, Nagler & Tucker. 2015. Political Expression and Action on Social Media: Exploring the Relationship Between Lower and Higher-Threshold Political Activities Among Twitter Users in Italy. Journal of Computer-

- Mediated Communication, International Communication Association. Vol 20 (2015) 221–239 © 2015. doi:10.1111/jcc4.12108.
- Faisyal. 2018. Membangun Image Partai Di atas Panggung Dramaturgis. Jurnal Oratio Directa, Vol 1, No.2, (2018). E-ISSN 2615-07435 (Sumber <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/oratio/article/view/59/41> yang diakses 28 Maret 2019).
- Glucksman, Morgan. 2017. The Rise of Social Media Influencer Marketing on Lifestyle Branding: A Case Study of Lucie Fink. *Elon Journal of Undergraduate Research in Communications*, Vol. 8, No. 2 • Fall 2017.
- Habibi. 2016. Meninjau Perkembangan Perda Syariah di Indonesia. *Jurnal el-Qanuniy* Volume 2 Nomor 1 Januari 2016.
- Hadi, Ido Prijana. 2009. Perkembangan Teknologi Komunikasi Dalam Era Jurnalistik Modern. *E-Journal PETRA*.
- Hariyariti, Puji. 2006. New Propaganda Model: Pertarungan Wacana Politik dalam Bisnis Media. *Jurnal Komunikasi*. Volume 1, Nomor 1, Oktober 2006. ISSN 1907 -848X. h 1 - 96.